

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan berlangsung sekali seumur hidup. Olson dan DeFrain (dalam Rizka, 2018) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu komitmen emosional yang legal untuk berbagi keintiman baik secara emosional maupun fisik antar dua orang yang saling berbagi tugas hingga sumber daya ekonomi. Kokohnya fondasi kesuksesan sebuah pernikahan bergantung pada tujuan pernikahan. Tidak hanya menyatukan dua manusia, pernikahan juga menyatukan dua keluarga besar.

Peran wanita yang telah menikah bukan hanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, melayani suami, namun telah berperan ganda, bahkan banyak yang menyebut sebagai *triple* peran, yaitu wanita sebagai istri dan ibu, sebagai penanggungjawab keluarga, dan sebagai pencari nafkah (Gustiana, 2018). Wanita yang bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh sebab itu, Seiring perubahan zaman tuntutan pekerjaan tidak lagi dikerjakan oleh pria, wanita mampu berperan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan bekerja atau berkarier.

Salah satu pekerjaan yaitu menjadi seorang anggota Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan instansi pemerintahan yang bekerja dalam bidang penegakkan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok dari anggota kepolisian yaitu

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Hal ini tercantum dalam UU Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 yaitu fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU Kepolisian No.2 Tahun 2002)

Profesi wanita karir salah satunya menjadi Polisi Wanita atau Polwan. Wanita yang bekerja sebagai polisi tentu memiliki tanggung jawab dan beban yang berat. Polwan yang bekerja di sektor publik dan juga harus bertanggung jawab dalam segala urusan rumah tangga dan memiliki beban kerja ganda (Craig & Sawrikar, 2009). Bekerja sebagai polisi tentu memiliki tanggung jawab dan beban yang berat. Polwan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan polisi laki laki, hal ini terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres X merupakan salah satu Polres yang berada di DI Yogyakarta memiliki 120 polwan yang dibagi menjadi beberapa satuan yaitu satuan Reskrim, satuan Intelkam, Satuan Reskrim Narkoba, Satuan Sabhara dan sisanya menjadi staf yang dibagi di 17 Polsek di Kabupaten X (dokumen demografi Satuan Reskrim Kabupaten X). Satuan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Satuan reskrim. Satuan Reskrim adalah bagian yang membantu Kapolres dalam

memberikan pertimbangan maupun saran mengenai pelaksanaan tugas satuan reskrim. Oleh karena itu, Satuan reskrim bertanggungjawab pada segala pelaksanaan tugas dan membuat laporan kepada Kapolres.

Satuan Reskrim khususnya Unit Pelayanan perempuan dan anak (UPPA) merupakan bagian yang memiliki beban tanggungjawab yang berat ketimbang satuan yang lainnya (dokumen deskripsi pekerjaan UPPA Polsek Kabupaten X). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Tujuan UPPA yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan atau tersangka yang ditangani di UPPA. Dengan demikian, selain menjadi penyidik, Polwan juga harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Polwan juga dituntut menyelesaikan berkas pemeriksaan dimana hal tersebut sangat menyita waktu dan Polwan juga harus lembur.

UPPA mempunyai kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan korban perempuan dan anak serta tindak pidana lainnya. Fungsi UPPA yaitu menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan eksek trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak (dokumen deskripsi pekerjaan UPPA Polsek Kabupaten X). Alasan Polwan mendampingi korban karena yang menjadi korban biasanya anak dibawah umur yang butuh pendekatan, dan dengan polwan korban merasa terlindungi karena sesama perempuan. Polwan yang bekerja di UPPA mempunyai masalah tentang

waktu bersama keluarga karena saat berada di rumah tidak dapat sepenuhnya untuk keluarga, jika kantor membutuhkan polwan harus segera datang ke kantor, karena bersifat *on call* yaitu sewaktu kantor membutuhkan polwan harus *stand by* menerima panggilan, tidak terkecuali jam malam polwan harus kembali ke kantor untuk melaksanakan tugas. Kondisi *stand by* untuk pekerjaan ini membuat Polwan terkadang tidak dapat terlibat penuh dalam hubungan rumah tangga (Giurge & Bohns, 2020).

Berdasarkan tugas polwan di atas, peneliti melakukan studi pendahuluan pada tanggal 30 September 2019 melalui wawancara kepada tiga subjek yang bertugas di Polres X, berikut hasil studi awal yang telah dilakukan: Subjek pertama menjelaskan bahwa menyeimbangkan waktu antara bekerja dan keluarga adalah hal yang tidak mudah, tidak dapat merasakan adanya keseimbangan kepuasan antara waktu bekerja dengan waktu berkumpul dengan keluarga, merasa kekurangan waktu bersama keluarga, tidak bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga akibat pekerjaan yang menyita waktu. Subjek kedua menjelaskan bahwa menyeimbangkan waktu antara bekerja dan keluarga adalah hal yang tidak mudah, merasakan adanya keseimbangan kepuasan antara waktu bekerja dengan waktu berkumpul dengan keluarga, merasa cukup waktu bersama keluarga, bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga akibat pekerjaan yang menyita waktu. Subjek ketiga menjelaskan bahwa tidak mudah menyeimbangkan waktu antara bekerja dan keluarga, tidak dapat merasakan adanya keseimbangan kepuasan antara waktu bekerja dengan waktu berkumpul dengan keluarga, merasa cukup waktu

bersama keluarga, dan tidak bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga akibat pekerjaan yang menyita waktu.

Selanjutnya, ketiga subjek secara konsisten merasakan ketidakmampuan untuk hadir secara penuh dalam memenuhi kedua perannya. Tugas dan tanggungjawab yang menuntut ketiga subjek harus tampil secara profesional belum dapat dipenuhi dengan mudah. Terlebih pada saat tanggungjawab kantor menuntut tenggat waktu yang cukup singkat sehingga ketiga subjek harus rela mengorbankan waktu dengan keluarga secara terpaksa. Hal tersebut disebabkan karena ketiga subjek masih merasakan perasaan terbebani dan kurang mampu untuk menyeimbangkan waktu pada kedua peran yang dimiliki. Dengan demikian, perilaku-perilaku yang ditunjukkan pada saat melaksanakan tugas kedua peran belum berjalan secara optimal. Ketiga subjek memilih untuk selalu *stand by* pada pekerjaannya sebagai polwan ketimbang perannya di keluarga.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kategori *work family balance* responden berada dalam kondisi yang tidak optimal. Hal tersebut menunjukkan dari tiga Polwan menyatakan bahwa dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, beberapa pekerja wanita masih merasa bahwa tuntutan di tempat kerja sangat ketat sehingga antara pekerjaan dan keluarga tidaklah seimbang. Hal ini dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di keluarga yang bisa jadi nantinya akan berimbas juga pada kinerja pekerja di tempat kerja.

Greenhaus, Collins, dan Shaw (dalam Handayani, 2013), menyatakan bahwa *work-family balance* merupakan sejauh mana individu terlibat dan puas

dengan peran dalam urusan pekerjaan dan keluarga. Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting, karena jika individu tidak memiliki waktu untuk bersantai dan memulihkan kembali fisiknya, kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan akan menurun. Tanpa adanya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, seseorang tidak dapat menikmati hidupnya dan akan merasa terbebani, kesulitan untuk bertemu dengan teman, keluarga, dan pasangan.

Konsep yang sama menunjukkan bahwa keseimbangan kerja keluarga adalah tidak adanya konflik atau gangguan dan adanya pengayaan (*enrichment*) dan integrasi antara peran kerja dan keluarga. Lebih lanjut dikatakan bahwa keseimbangan antara kerja dan keluarga akan dicapai bila *work family conflict* yang dialami individu berada dalam kategori rendah dan *work family enrichment* yang dialami individu dalam kategori tinggi (Greenhaus, 2006).

Work-life balance sering disamakan dengan *work-family balance* karena keluarga merupakan bagian dalam kehidupan individu. Banyak organisasi menggunakan istilah *work-life balance* untuk pekerja yang bukan berstatus sebagai orangtua atau menikah, namun untuk pekerja yang menginginkan keseimbangan dalam pekerjaan dan kegiatan di luar pekerjaan seperti olahraga, wisata, dan studi. Sedangkan *work-family balance* digunakan untuk pekerja yang berstatus sebagai orang tua atau telah menikah yang menginginkan keseimbangan dalam pekerjaan dan keluarganya (Kalliath & Brough, 2008).

Terdapat beberapa aspek yang menyusun *work-family balance*. Aspek tersebut adalah (1) keseimbangan waktu yaitu waktu yang sama yang dihabiskan untuk bekerja dan menjalankan peran dalam keluarga, (2) keseimbangan

keterlibatan yaitu tingkat keterlibatan psikologis yang sama dalam peran pekerjaan dan keluarga, dan yang terakhir adalah (3) keseimbangan kepuasan yaitu tingkat kepuasan yang sama dengan peran pekerjaan dan keluarga (Greenhaus, Collins & Shaw, 2003).

Berdasarkan hasil wawancara pada Polwan pada tanggal 4 November 2019 tiga dari tiga polwan merasakan tidak adanya keseimbangan kerja dengan keluarga karena jam kerja yang tidak menentu dan bersifat *on call*. Hal tersebut menjadikan Polwan tidak terlibat sepenuhnya dalam rumah tangga. Selain itu, berdasarkan keterlibatan secara fisik dan psikologis, keempatnya juga mengeluhkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi Ketika dalam satu peran memberikan tekanan kepada polwan. Hal-hal tersebut membuat Polwan merasa kurang puas dalam menjalankan kedua perannya. Dengan demikian, *work family balance polwan* belum tercapai secara optimal.

Manusia bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Seiring perubahan zaman tuntutan pekerjaan tidak lagi dikerjakan oleh pria saja tetapi juga wanita. Wanita mampu berperan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan bekerja atau berkarir. Wanita yang sudah menikah yang mengambil keputusan untuk bekerja dituntut untuk memiliki *work family balance* yang baik, sehingga semua tugasnya dapat berjalan dengan lancar. *Work family balance* memainkan peranan yang penting karena karyawan atau bawahan menginginkan untuk mencapai dan memenuhi antara kewajiban pada pekerjaan dan kewajiban di luar pekerjaan (keluarga). Adanya *work*

family balance yang baik, konflik dan ketegangan di masing-masing peran dapat diminimalisir (Maulana, 2017).

Pada dasarnya, fenomena *work family balance* telah banyak ditelaah pada penelitian sebelumnya (Kalpana & Deshmukh, 2018; Rehman & Roomi, 2012) terutama dari pespektif budaya daerah yang menjadi tempat tinggal wanita yang bekerja. Wanita yang bekerja di dalam budaya yang konservatif termasuk Indonesia cenderung akan memilih pekerjaan yang tidak memiliki resiko besar dalam menjalankan kedua perannya. Di lain sisi, wanita yang bekerja pada sektor publik yang bersinggungan dengan jasa pelayanan masyarakat diakui masih memiliki banyak kendala dalam kesehariaannya (Ugwu, Oriakor, Enwereuzor, Onyedibe, & Ugwu, 2016) salah satunya adalah profesi Polwan.

Selain itu, kedalaman makna dimengerti sebagai tujuan hidup yang menyebabkan kehidupan menjadi lebih berarti (Bastaman, 1996) dan penjelasan tersebut belum ditelaah pada penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada studi deskriptif. Makna yang mewarnai peran ganda seorang wanita pekerja merupakan kunci dari seorang individu terhindar dari perasaan tertekan maupun keputusasaan. Dengan demikian, peneliti menganggap penting untuk mengeksplorasi makna *work family balance* dalam menjalankan peran wanita yang berprofesi sebagai polwan agar didapatkan bagaimana mereka berproses hingga menemukan makna untuk menuju kondisi peran kehidupan yang membahagiakan. Berdasarkan latar belakang yang telah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian: bagaimana *work family balance* pada Polwan yang sudah menikah?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *work family balance* pada Polwan yang sudah menikah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi industri organisasi terutama yang berkaitan dengan *work family balance* pada Polwan yang telah menikah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Psikologi, dan dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi mengenai *work family balance* pada Polwan yang sudah menikah pada pimpinan organisasi, keluarga maupun perempuan itu sendiri.
- 2) Dengan mengetahui informasi tersebut diharapkan pimpinan organisasi dan keluarga dapat memberikan dukungan yang positif dan dapat memahami peran ganda yang dialami wanita karir.